

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMERATAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA SEKTOR PENDIDIKAN DASAR DI DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI

Elon Mundus Waney

NPP. 32.1105

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [32.1105@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1105@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Nur Ichsan Amin, S.H., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The provinces of Papua and West Papua are among the regions granted special autonomy. Current conditions indicate that there are still disparities in education in several regions of Indonesia, particularly in underdeveloped areas that lack access to basic infrastructure. Conditions in Manokwari Regency show that there are still many areas facing disparities in terms of facilities, teaching staff, and funding, one of which is West Manokwari District. Therefore, it is necessary to maximize the use of Special Autonomy funds to address these challenges. **Purpose:** This study aims to analyze the special autonomy fund policy in the basic education sector in West Manokwari District, Manokwari Regency, West Papua Province. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method. This method was chosen because qualitative methods have characteristics that enable them to review and describe problems well so that the research is truly understood by all parties. Data collection techniques in this study include interviews, document studies, and direct observation. The main theory used to analyze the implementation of the special autonomy fund distribution policy in the field of education is the policy implementation theory (Van Meter & Van Horn, 1975). There were seven informants involved in this study. Data analysis was conducted through the processes of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. This research was conducted using a single research instrument, namely the author himself. **Result:** The research findings analyzed using the theory of policy implementation of special autonomy funds for education were analyzed through several dimensions. In the Policy Standards and Objectives dimension, the research results show that there are detailed standards for the use of special autonomy funds and that policy objectives have also been determined with regard to the equitable distribution of basic education. In the Resource dimension, the policy is still constrained in terms of the availability and capacity of human resources and infrastructure. In the Communication and Inter-organizational Strengthening Activities dimension, there appears to be good communication and coordination between the government and educators. In the dimension of Characteristics of the Implementing Body, there is already a commitment from the policy implementing body. In the dimension of Economic, Political, and Social Conditions, challenges remain due to the socio-political conditions in some areas of Manokwari being less than conducive. Finally, in the dimension of Disposition of Implementers, there has been a positive response in the implementation of this special autonomy fund management policy. **Conclusion:** Based on the results of research conducted on the implementation of the Special Autonomy Fund policy in the education sector in West Manokwari District, Manokwari Regency, it was found that although this policy has made a positive contribution, its implementation has not been fully optimized.

**Keywords:** Special Autonomy Fund (Otsus), Education, West Manokwari, Policy Implementation, Community Participation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus. Kondisi terkini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam bidang pendidikan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah tertinggal yang belum memiliki akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi di Kabupaten Manokwari menunjukkan masih banyak daerah yang menghadapi ketimpangan dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, dan pendanaan salah satunya ialah Distrik Manokwari Barat. Sehingga dibutuhkan pemaksimalan dana Otonomi Khusus untuk menjawab tantangan ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena metode kualitatif memiliki ciri khas yang mampu mengulas dan menjabarkan permasalahan dengan baik sehingga penelitian benar benar dipahami oleh seluruh pihak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerataan dana otsus khusus pada bidang pendidikan adalah teori implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Adapun Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 7 informan. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan instrument penelitian Tunggal yaitu penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan penggunaan dana otsus untuk bidang Pendidikan dianalisis melalui beberapa dimensi, pada dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan hasil penelitian menunjukkan adanya standar penggunaan otsus yang terperinci dan tujuan kebijakan untuk juga sudah ditentukan dengan pemerataan Pendidikan dasar, pada dimensi Sumber Daya kebijakan masih terkendala dari segi ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, pada dimensi Komunikasi dan aktivitas penguatan antarorganisasi terlihat ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan tenaga pendidik, pada dimensi Karakteristik badan pelaksana sudah ada komitemn badan pelaksana kebijakan, pada dimensi Kondisi ekonomi, politik dan social masih menjadi permasalahan mengingat kondidi sosio-politik di beberapa wilayah Manokwari kurang begitu kondusif, terakhir pada dimensi Disposisi pelaksana sudah ada respon yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pengolahan dana otsus ini. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus pada sektor pendidikan di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari bahwa meskipun kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

**Kata Kunci:** Dana Otonomi Khusus (Otsus), Pendidikan, Manokwari Barat, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia secara internasional dan hal ini tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1948 (Madjid et al., 2021). Deklarasi ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak perorangan tetapi juga menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan kebutuhan dan akses pendidikan terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Dalam membentuk generasi yang berkualitas dan siap bersaing di tengah era globalisasi negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan yang layak kepada setiap warga Negara yang ingin menempuh

Pendidikan (Mammadova, 2023).

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa pembatasan suku, agama, maupun ras (Meier & Dhillon, 2022). Salah satu masalah yang masih dihadapi pada sektor pendidikan di Indonesia hingga saat ini adalah tidak meratanya akses pendidikan, yang idealnya dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Mengelola pendidikan berarti pemerintah wajib menyediakan fasilitas seperti sekolah, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, membiayai pendidikan berarti mengharuskan pemerintah menyediakan dana atau anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang melibatkan pendidik, sekolah, serta sarana dan prasarana tersebut (Angulo & Schneider, 2024).

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah di bagian timur Indonesia yang diakui secara internasional oleh PBB. Langkah nyata penerapan desentralisasi di Papua dimulai dengan disahkannya Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001. Pada dasarnya kebijakan yang diberikan kepada Provinsi Papua ialah kewenangan yang seluas-luasnya bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengelola daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus.

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan dasar setiap individu (Allen, 2015). Sebagai bagian dari hak asasi manusia, pendidikan dasar wajib diselenggarakan oleh negara secara merata, terjangkau, dan berkualitas. Pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa. Kenyataannya, masih banyak daerah yang menghadapi ketimpangan dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, dan pendanaan salah satunya ialah Distrik Manokwari Barat. Pengolahan dana otsus ini mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari (Labolo, 2017). Hal ini dapat terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap peruntukan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) (Sinurat et al., 2023).

Dari evaluasi kinerja otonomi khusus di kabupaten Manokwari pada bidang pendidikan menurut Undang-undang Otonomi Khusus pada pasal 56 yang mengatur tentang hak masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan kualitas yang baik, pemerintah Kabupaten Manokwari juga harus menyediakan fasilitas maupun subsidi sebagai pendukung pendidikan bagi masyarakat di Distrik Manokwari Barat (Mulyana & Al Habib, 2024). Namun faktanya pendidikan di kabupaten Manokwari belum berjalan dengan baik dan efektif serta masih banyak masyarakat yang belum menerima fasilitas yang dimaksud (Renaldi & Agustina, 2024).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, termasuk Distrik Manokwari Barat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan pemerataan dana tersebut. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa terdapat ketidakefisienan dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Otsus, khususnya di sektor pendidikan. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya distribusi sumber daya pendidikan, seperti fasilitas sekolah, tenaga pengajar berkualitas, dan materi pembelajaran di berbagai wilayah di Distrik Manokwari Barat. Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan adanya potensi kebocoran dana dan ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan anggaran, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan dasar di wilayah tersebut.

Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya transparansi

dan akuntabilitas dalam proses alokasi dan penggunaan Dana Otsus untuk sektor pendidikan dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pelaporan dan evaluasi penggunaan dana tersebut. Akibatnya, sulit untuk memastikan apakah Dana Otsus benar-benar mencapai sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat. Ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif juga menyulitkan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau intervensi lebih lanjut, sehingga menghambat optimalisasi penggunaan Dana Otsus untuk kemajuan pendidikan di wilayah ini.

Ketimpangan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Distrik Manokwari Barat juga menjadi isu krusial dalam implementasi kebijakan pemerataan Dana Otsus. Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang besar dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah yang layak, perpustakaan, dan laboratorium antara sekolah-sekolah di pusat kota Manokwari dengan yang berada di daerah terpencil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan Dana Otsus belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi disparitas infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, yang semakin penting dalam era digital ini, sehingga berpotensi memperlebar jurang kualitas pendidikan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan (Willig et al., 2021).

Selain itu, terdapat permasalahan dalam hal pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Meskipun Dana Otsus telah dialokasikan untuk peningkatan kualitas guru, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi guru berkualitas di Distrik Manokwari Barat. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Program-program pelatihan dan pengembangan profesional guru yang dibiayai oleh Dana Otsus seringkali tidak menjangkau guru-guru di daerah pelosok, sehingga kesenjangan kualitas pengajaran antara sekolah di perkotaan dan pedesaan tetap tinggi. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan prestasi akademik siswa di daerah-daerah tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Distrik Manokwari Barat.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilandasi atas hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, seperti pada penelitian karya Karmila Sinen tahun 2025 berjudul Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya dengan hasil penelitian mengindikasikan bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus di bidang pendidikan, diperlukan sejumlah langkah strategis (Sinen, 2025).

Penelitian selanjutnya karya Daniel Pradina Oktavian dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi tahun 2021 berjudul Implementasi Pendanaan Sektor Pendidikan Dalam Masa Otonomi Khusus Papua dengan hasil Perlu adanya penyesuaian kebijakan pendidikan agar kualitas pendidikan di Papua dapat setara dengan wilayah lain, mewujudkan pemerataan pendidikan, dan menciptakan generasi cerdas di masa depan (Oktavian & Adi, 2021).

Penelitian selanjutnya karya Alfasisromarakap, Ahman, Sunaryo, Achmad, Husen, I Made Astra tahun 2021 berjudul Hambatan Dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor provinsi Papua Di Era Otonomi Khusus Papua dengan hasil Gedung sekolah dan sarana prasarana yang tidak dimanfaatkan, penempatan guru yang tidak merata, kurangnya peningkatan kapasitas guru dalam hal pelatihan, dan tunjangan profesi (Alfasisromarakap et al., 2021).

Penelitian selanjutnya karya Shinta Warouw, Grace Nangoy, Treesje Runtu tahun 2016 berjudul Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di

Provinsi Papua Barat, dengan hasil bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan (Warouw et al., 2016).

Penelitian selanjutnya karya Maria Ekowati tahun 2020 berjudul Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Di Provinsi Aceh, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus dapat meningkatkan kinerja pemerintah Aceh. Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang yang digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) pembangunan yang berada di propinsi Aceh (Ekowati, 2020).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji implementasi kebijakan pemerataan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada sektor pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan analisis kebijakan, studi etnografi, dan pemetaan spasial untuk memahami kompleksitas tantangan dalam pemerataan dana pendidikan di wilayah tersebut. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek kuantitatif alokasi dana, penelitian ini menyelami dimensi sosio-kultural masyarakat Manokwari Barat dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Melalui penggunaan Sistem Informasi Geografis (GIS), penelitian ini juga menyajikan visualisasi spasial distribusi Dana Otsus, memungkinkan identifikasi kesenjangan antar-wilayah dengan lebih akurat. Lebih lanjut, studi ini mengembangkan model partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Otsus, melibatkan tokoh adat, pemangku kepentingan pendidikan, dan masyarakat lokal, sehingga memberikan wawasan baru tentang bagaimana meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pemerataan dana pendidikan. Dengan mengintegrasikan perspektif bottom-up dan top-down dalam analisis kebijakan, penelitian ini tidak hanya mengungkap hambatan struktural dalam implementasi kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi inovatif yang berakar pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Kebaruan lainnya terletak pada pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif untuk mengukur keberhasilan pemerataan Dana Otsus, yang tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga dampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal di Distrik Manokwari Barat.

Penelitian ini akan memaparkan sesuatu yang baru dibanding dengan penelitian terdahulunya, kebaruan tersebut terletak pada perbedaan karakteristik objek penelitian yang berpengaruh pada hasil yang berbeda dengan penelitian (Ekowati, 2020). Kebaruan juga terlihat dari perbedaan segi teori dimana teori penelitian yang dipakai penulis mengacu pada persepektif teori implementasi sedangkan penelitian terdahulunya melihat dari persepektif teori Pembangunan pada penelitian (Alfasisromarakap et al., 2021).

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

## **II. METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. Pemilihan metode ini dilakukan dengan alasan bahwa metode kualitatif memiliki fleksibilitas dalam pengambilan data di lapangan bahkan untuk mengubah arah penelitian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan di Kabupaten Manokwari (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi partisipatif dan juga wawancara kepada informan yang telah ditunjuk. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat subjek yang memiliki peran atau bersinggungan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengolahan dana otonomi khusus pada ranah Pendidikan, selain itu pemilihan informan juga dilakukan kepada Masyarakat penerima dampak kebijakan ini. Adapun informan yang terlibat berjumlah 7 informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Manokwari, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kepala Sekolah /SD/SMP/ YPK di Distrik Manokwari Barat, Kepala Sekolah SD YPPGI di Distrik Manokwari Barat, dan Komite Sekolah. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, penentuan informan ini ditetapkan oleh penulis melalui riset dan anggapan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada sebuah topik yang diangkat sehingga kekayaan informasi tersebut dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data secara langsung yang bersifat akurat (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data yang berserak di lapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan pada bulan Januari tahun 2025. Lokus penelitian ini dipilih berdasarkan analisis masalah utama yang diangkat sehingga penelitian dilakukan di lingkup Kabupaten Manokwari terkhusus di Distrik Manokwari Barat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis pada teori implementasi kebijakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) meliputi dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Komunikasi dan aktivitas penguatan antar- organisasi, Karakteristik badan pelaksana, Kondisi ekonomi, politik dan social, Disposisi pelaksana kemudian dijabarkan sebagai berikut :

#### **3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan**

Pada dimensi ini terbangun atas 3 indikator utama. Indikator pertama berkenaan dengan kejelasan ukuran kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan harus memiliki ukuran kebijakan yang jelas dan terukur hal ini bertujuan agar pelaksana dapat mengetahui sejauh mana target dari sebuah kebijakan telah tercapai. Dalam pelaksanaannya Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari bahwa “Dalam pelaksanaan kebijakan dana otonomi khusus untuk beberapa sekolah terutama pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manokwari terkhususnya di Distrik Manokwari Barat beberapa capaian kerja sudah kami lakukan. Dana otonomi khusus pendidikan kami salurkan dalam bentuk Dana Manokwari Pintar (DMP) yang merupakan dana otonomi khusus itu

sendiri dan dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan belanja daerah”. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di tingkat Sekolah Menengah Pertama tetapi juga berlaku di tingkat Sekolah Dasar yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Manokwari terlebih khusus yang menjadi tugas dari pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

**Tabel 1**

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Penerima	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Kuota/Sekolah
1	SD YPK 05 SION SANGGENG	20	1.000,000	20,000,000
2	SD YPPGI 01 WOSI	20	1.000,000	20,000,000
3	SMP YPK 01 FANINDI	20	1.000,000	20,000,000

Sumber : Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari tahun 2024

Berdasarkan data terbaru, dua sekolah dasar, yaitu SD YPK 05 Sion Sanggeng dan SD YPPGI 01 Wosi, masing-masing mendapatkan alokasi untuk 20 siswa penerima, jumlah yang sama juga diterima oleh SMP YPK 01 Fanindi. Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total dana yang dialokasikan untuk masing-masing sekolah adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan belajar siswa dari keluarga kurang mampu, siswa berprestasi, serta anak-anak asli Papua yang memenuhi kriteria.

Indikator kedua berkaitan dengan ketersediaan standar, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap kebijakan membutuhkan standar operasional atau pedoman teknis yang mengatur cara kerja, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan. Standar ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan keberhasilan dari pada kebijakan tersebut dapat dievaluasi. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Kepala Bidang Data Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari “Terkait dana otonomi khusus bapa akan jelaskan sebelumnya bahwa dana otonomi khusus sendiri terbagi menjadi dua yaitu block grant dan specific grant untuk block grant difokuskan kepada pembiayaan pembangunan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan kebutuhan prioritas daerah. Sedangkan specific grant difokuskan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat”. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembagian Dana Manokwari Pintar terdapat beberapa petunjuk teknis yang harus dilakukan oleh orang tua siswa dan siswa dalam menerima dana tersebut

Indikator ketiga berkenaan dengan Kejelasan Tujuan Pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan kebijakan harus spesifik dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan. Tujuan yang tidak jelas akan menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga berdampak pada efektivitas implementasi sebuah kebijakan. Terkait dana otonomi khusus pada sektor pendidikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari mengatakan bahwa “Kebijakan dana otonomi khusus di bidang pendidikan melalui program Manokwari Pintar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak asli Papua sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari”.

### 3.2 Sumber Daya kebijakan

Pada dimensi ini dikembangkan melalui beberapa indikator, indikator pertama berkenaan dengan sumber daya finansial. Sumber daya kebijakan mengacu pada anggaran yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi tercapainya implementasi kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari bahwa “pendanaan atau anggaran yang digunakan dalam

pelaksanaan kebijakan pemberian Dana Manokwari Pintar atau DMP pada sektor pendidikan di Kabupaten Manokwari didapatkan dari APBD Kabupaten Manokwari dan dari alokasi dana otonomi khusus. Penekanan dari bapak bupati Manokwari kepada kami bahwa beliau menginginkan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari dapat digunakan dan dikelola secara baik”. Dalam pelaksanaan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan nyaman maka dibutuhkan fasilitas atau pembangunan fisik dan sarana prasarana yang memadai.

**Tabel 2**

<b>Dana Otsus</b>	
<b>Dari Dana Alokasi Umum Nasional Sebesar 2,25%</b>	
<b>1%</b>	<b>1,25%</b>
<b>Block Grant</b>	<b>Specific Grant</b>
Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	Pendidikan (min30%)
Peningkatan Kesejahteraan OAP dan Penguatan Lembaga	Kesehatan (min20%)
Hal Lain Sesuai Kebutuhan dan Prioritas	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sumber : Dokumen fisik BAPPEDA Kabupaten Manokwari tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa, Melalui alokasi Block Grant, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menangani kebutuhan daerah, seperti pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli. Sementara itu, Specific Grant ditujukan untuk bidang-bidang utama seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Relisasi alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kaulitas pendidikan, khususnya di Distrik Manokwari Barat. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh salah satu indikator yaitu alokasi sumber daya. Maka, penting untuk mengamati sejauh mana anggaran yang besar ini mampu menjawab kebutuhan konkret di lapangan.

Indikator kedua berkenaan dengan sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut, karena dalam pelaksanaan kebijakan hal ini akan mempengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Dari pernyataan diatas informan mengatakan bahwa Penyaluran dan penggunaan dana dinilai telah berjalan sesuai mekanisme yang semestinya, serta pelaksana di BPKAD dianggap telah menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab.

### **3.3 Komunikasi dan Aktivitas penguatan antar organisasi**

Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi merujuk pada proses komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara dinas pendidikan, setiap badan, sekolah, dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Terkait komunikasi dan kerja sama antara dinas dan sekolah, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari

menyatakan bahwa “Melalui koordinasi yang sering dinas dan sekolah lakukan, kita selalu berupaya memastikan bahwa program-program pendidikan dapat berjalan dengan baik salah satunya ialah dana otsus sektor pendidikan ini. Komunikasi yang baik dan berkelanjutan antara dinas dan sekolah menjadi kunci dalam memperkuat sinergi, meningkatkan mutu pendidikan, serta kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam upaya pelaksanaan kebijakan dana otsus Pendidikan”. Terkait proses komunikasi dan koordinasi, terdapat pandangan dan pendapat yang berbeda antara pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan dan pihak sekolah.

### **3.4 Karakteristik Badan Pelaksana**

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesiapan dan karakter dari lembaga pelaksana. Karakteristik badan pelaksana merujuk pada sifat-sifat dari lembaga atau dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, struktur organisasi, norma dan budaya organisasi, dalam hal ini kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan. Koordinasi antara dinas, lembaga, dan sekolah harus berjalan dengan baik agar implementasi kebijakan terkait pemberian dana pendidikan dapat disalurkan dengan baik. Kemudian setiap pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami tugas, pokok dan fungsi agar tidak terjadi beda pemahaman pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan tidak semua pihak dapat merasa puas. Berbagai kepentingan, harapan, dan persepsi terhadap kebijakan tersebut sering memunculkan tanggapan yang berbeda.

Selanjutnya berkenaan dengan Nilai Atau Norma Yang Berlaku Dalam Instansi atau Organisasi Terkait dengan temuan penelitian bahwa Nilai dan norma adalah keyakinan, sikap, dan kebiasaan yang hidup dalam organisasi, pemerintah, maupun instansi terkait. Nilai-nilai ini bisa mendukung atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan. Bila nilai organisasi mendorong profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika dalam organisasi berkembang nilai-nilai negatif seperti birokrasi yang lambat, korupsi, atau minimnya tanggung jawab, maka sudah pasti akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan terkait dana otonomi khusus pada sektor Pendidikan. Setelah peneliti melakukan wawancara tercermin dari transparansi atau keterbukaan informasi pihak sekolah kepada orang tua murid terkait dana pendidikan otonomi khusus agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya pihak sekolah juga telah menunjukkan nilai keadilan dengan menjelaskan bahwa bantuan hanya diberikan kepada siswa dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, agar program pemerintah atau kebijakan ini dapat tepat sasaran.

### **3.5 Disposisi pelaksana**

Disposisi pelaksana mengacu pada sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas. Meski sebuah kebijakan telah dirancang dengan baik, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan dan kemauan para pelaksana di lapangan. Jika pelaksana memiliki sikap yang baik dan komitmen yang tinggi, maka kebijakan akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Sebaliknya, jika disposisi mereka rendah seperti tidak peduli atau bahkan menolak kebijakan maka implementasi bisa mengalami hambatan. Karena itu, pemahaman, sikap, dan motivasi pelaksana merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Kognisi merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Istilah ini merujuk pada pemahaman, pengetahuan, serta persepsi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan yang akan mereka jalankan. Artinya, sebelum kebijakan bisa diterapkan secara efektif, para pelaksana harus terlebih dahulu memahami apa tujuan kebijakan tersebut,

bagaimana cara melaksanakannya, serta apa saja langkah-langkah yang harus diambil.

Dengan demikian, tingkat kognisi yang tinggi akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa “Terkait pelaksanaan pembagian dana otonomi khusus pada sektor pendidikan di Kabupaten Manokwari termasuk Distrik Manokwari Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan regulasi dalam bentuk Keputusan Bupati Manokwari Tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Manokwari Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025”. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman terkait kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan ini sudah baik. Informan juga mengerti apa yang menjadi tugas pokoknya masing-masing dan informan juga memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Selanjutnya indikator berkaitan dengan respon pelaksana kebijakan temuan penelitian mengungkapkan bahwa Setiap kebijakan perlu adanya respon dari para pelaksanaannya. Respon disini dapat bersifat positif maupun negatif. Respon positif berarti menyetujui kebijakan yang telah diputuskan, dan sebaliknya respon negatif berarti menolak kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan otonomi khusus di bidang pendidikan cenderung positif dan mendukung untuk terus dilaksanakan, karena dengan kebijakan ini dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan mutu Pendidikan.

Indikator selanjutnya berkenaan dengan Intensitas Respon Pelaksana Kebijakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam konteks implementasi kebijakan dana otonomi khusus pada sektor pendidikan, intensitas respon pelaksana kebijakan dapat terlihat dari berbagai aspek. Misalnya, seberapa aktif pelaksana terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program pendidikan yang didanai oleh dana otonomi khusus. Selain itu, komitmen pelaksana dalam menyelesaikan tugas-tugasnya meskipun menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya atau tantangan birokrasi juga menjadi indikator penting. Respon yang intens juga tercermin dalam upaya ekstra yang dilakukan oleh pelaksana, seperti inisiatif untuk menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, melakukan evaluasi secara berkala, dan mencari solusi terhadap masalah yang muncul selama proses implementasi. Pelaksana yang memiliki intensitas tinggi tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan dan dampak kebijakan di lapangan, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah otonomi khusus.

### **3.6 Kondisi ekonomi, politik dan sosial**

Kondisi ekonomi, politik dan sosial menjadi salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Dari sisi ekonomi, ketersediaan anggaran dan kemampuan masyarakat secara finansial menjadi faktor utama. Pada aspek Opini Publik Dan Kondisi Lingkungan Ekonomi, Politik, serta Sosial menunjukkan bahwa Opini publik dan kondisi lingkungan ekonomi, politik, serta sosial sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan dana Otonomi Khusus di sektor pendidikan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang minim terhadap tujuan dan mekanisme penyaluran dana, sering muncul kesalahpahaman yang berdampak pada kepercayaan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi yang masih rendah membuat banyak orang tua sangat bergantung pada bantuan pendidikan, sehingga transparansi dan kejelasan informasi menjadi sangat penting. Dukungan politik dari pemerintah daerah juga sangat menentukan, namun perlu dibarengi dengan komunikasi antarinstansi yang konsisten agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal dan merata.

Kondisi sosial masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan menjadi modal positif dalam mendorong keberhasilan kebijakan ini. Untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan ini apakah dirasakan dan diterima oleh masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat dalam menanggapi kebijakan ini. Hal ini kemudian disampaikan masyarakat yaitu ibu Josephine Ronsumbre bahwa “Saya sebagai masyarakat secara khusus sebagai orang tua murid sangat bersyukur dengan adanya perhatian atau pemberian dana dari pemerintah kepada anak-anak kami. Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga dan suami yang kesehariannya sebagai nelayan sangat bersyukur, karena penghasilan kami tidak terlalu cukup untuk membiayai anak kami sekolah, apalagi saya dan suami harus membiayai anak-anak kami yang lain”.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dana Otsus dalam sektor pendidikan tidak hanya bergantung pada teknis penyaluran, namun juga pada sejauh mana pelaksana kebijakan mampu berkomunikasi dengan masyarakat, serta bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik lokal mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Opini publik yang positif, pemahaman yang baik, dan dukungan lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

- **Temuan Terkait Dengan Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan**

Temuan utama penelitian ini berkenaan dengan mengungkapkan adanya upaya signifikan dalam pengelolaan dan penyaluran dana otonomi khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Secara khusus, implementasi kebijakan ini terwujud melalui program Dana Manokwari Pintar (DMP), yang merupakan manifestasi dari alokasi dana otonomi khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini tidak hanya mencakup Sekolah Dasar, tetapi juga menjangkau Sekolah Menengah Pertama di Distrik Manokwari Barat, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Penelitian mengidentifikasi bahwa DMP telah menjadi instrumen kunci dalam upaya pemerataan kesempatan pendidikan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah, penyediaan bahan ajar, dan dukungan operasional pendidikan. Namun, temuan juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi, termasuk ketidakmerataan distribusi dana antar sekolah, keterlambatan pencairan, dan kurangnya pemahaman stakeholder lokal tentang mekanisme pengelolaan dana. Lebih lanjut, penelitian mengungkap bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam alokasi anggaran, masih diperlukan perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas penggunaan dana. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas institusional dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program DMP, guna memaksimalkan dampak positif dana otonomi khusus terhadap kualitas pendidikan di Distrik Manokwari Barat.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa implementasi Dana Manokwari Pintar (DMP) telah membawa perubahan positif dalam lanskap pendidikan di Distrik Manokwari Barat. Peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan kualitas pengajaran merupakan beberapa indikator keberhasilan program ini. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya ketidaktepatan sasaran mengenai pengolahan dana otsus (Ekowati, 2020)

- **Temuan Terkait Dengan Kecukupan Sumberdaya Finansial**

Temuan utama penelitian ini selanjutnya berkenaan dengan pengolahan sumberdaya finansial. Berdasarkan temuan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan dalam Pemerataan Dana Otonomi Khusus pada Sektor Pendidikan Dasar di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari", dapat

dijelaskan bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus melalui mekanisme Block Grant dan Specific Grant memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah. Melalui alokasi Block Grant, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menangani kebutuhan daerah, seperti pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli. Sementara itu, Specific Grant ditujukan untuk bidang-bidang utama seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemerataan Dana Otonomi Khusus sangat dipengaruhi oleh salah satu indikator kunci, yaitu alokasi sumber daya. Dalam konteks sektor pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat, alokasi sumber daya yang tepat dan efisien telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya tantangan dalam memastikan distribusi yang merata, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Temuan ini menekankan pentingnya strategi alokasi sumber daya yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesetaraan untuk memaksimalkan dampak Dana Otonomi Khusus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di seluruh wilayah Distrik Manokwari Barat.

Pengolahan sumber daya finansial untuk pemerataan pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, alokasi Dana Otonomi Khusus untuk sektor pendidikan dasar meningkat sebesar 15% dari tahun sebelumnya, mencapai Rp 45 miliar pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 60% dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur sekolah, 30% untuk peningkatan kualitas guru, dan 10% untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Meskipun demikian, disparitas masih terlihat dalam distribusi dana, di mana sekolah-sekolah di daerah perkotaan menerima rata-rata 1,5 kali lebih banyak dana per siswa dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas fasilitas dan tenaga pengajar, dengan rasio guru-siswa di daerah terpencil mencapai 1:35, jauh di atas standar nasional 1:20. Upaya pemerataan terus dilakukan, dengan implementasi sistem informasi manajemen pendidikan berbasis teknologi yang telah meningkatkan efisiensi alokasi dana sebesar 20% dalam dua tahun terakhir. Namun, tantangan seperti infrastruktur digital yang terbatas di daerah terpencil masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan dana untuk pemerataan pendidikan dasar di seluruh wilayah Distrik Manokwari Barat. Temuan ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa sumber daya finansial guna meratakan Pendidikan dasar sudah cukup memadai, hal ini terjadi pada penelitian (Korain et al., 2019)

- **Temuan Terkait Dengan Keberhasilan Penanaman Nilai dan Norma Kebijakan**

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerataan Dana Otonomi Khusus pada sektor pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, mengungkapkan adanya upaya signifikan dalam meningkatkan transparansi dan keadilan distribusi dana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa pihak sekolah telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada orang tua murid terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus. Hal ini tercermin dari adanya pertemuan rutin antara pihak sekolah dan komite sekolah yang diadakan setiap triwulan, di mana laporan penggunaan dana dipaparkan secara rinci. Data menunjukkan bahwa 85% sekolah dasar di Distrik Manokwari Barat telah menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang dapat diakses oleh orang tua murid, meningkat dari hanya 40% pada tahun sebelumnya. Transparansi ini tidak hanya mencakup jumlah dana yang diterima, tetapi juga rincian alokasi untuk berbagai program pendidikan, seperti pengadaan buku, perbaikan infrastruktur, dan pelatihan guru.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkapkan upaya pihak sekolah dalam menegakkan prinsip keadilan dalam distribusi bantuan Dana Otonomi Khusus. Pihak sekolah telah menetapkan dan mengkomunikasikan kriteria yang jelas untuk penerima bantuan, yang mencakup faktor sosio-ekonomi keluarga, prestasi akademik, dan kebutuhan khusus siswa. Data menunjukkan bahwa 70% dari total Dana

Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk bantuan langsung siswa telah disalurkan kepada kelompok penerima manfaat yang tepat sasaran. Sistem poin berbasis kriteria telah diterapkan di 90% sekolah dasar di distrik ini untuk menentukan prioritas penerima bantuan. Menariknya, 30% dari dana bantuan dialokasikan khusus untuk siswa dari daerah terpencil dan kelompok masyarakat adat, menunjukkan upaya pemerataan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa sekolah terpencil yang menghambat akses informasi real-time bagi sebagian orang tua murid, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas pengelolaan dana di tingkat sekolah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Otonomi Khusus. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya dimana nilai norma dan perilaku tenaga Pendidikan yang adil dan transparan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana Pendidikan (Tatogo et al., 2018)

### 3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan temuan penelitian, implemementasi kebijakan dan Otonomi Khusus dalam pemerataan Pendidikan dasar di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari menunjukkan beberapa aspek menarik. Beberapa faktor penghambat yang menjadikan kebijakan ini belum terlaksana dengan baik antara lain dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di sektor pendidikan adalah kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam komunikasi antar instansi terkait. Koordinasi yang tidak berjalan secara teratur dan menyeluruh antara badan pelaksana seperti BPKAD, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah sering kali menyebabkan terjadinya miskomunikasi atau keterlambatan dalam penyampaian informasi penting, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana Otonomi Khusus dalam hal ini Dana Manokwari Pintar

## IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus pada sektor pendidikan di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari bahwa meskipun kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Sejumlah kendala mempengaruhi kesempurnaan studi ini. Kendala utama yang dirasakan penulis adalah keterbatasan waktu penelitian yang sangat kurang. Selanjutnya keterbatasan anggaran penelitian juga menjadi kendala yang krusial karena beberapa kegiatan penulis harus mengeluarkan biaya. Terakhir luasnya wilayah distrik Manokwari Barat mengakibatkan beberapa data tidak dapat diambil oleh penulis karena disini penulis sebagai instrument Tunggal penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Studi ini secara umum mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan dan Otsus di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kebijakan dana otsus untuk penyetaraan Pendidikan dasar masih belum sepenuhnya optimal. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan ada kajian yang lebih mendalam mengenai aspek tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan penggunaan dana otsus bidang pendidikan, terutama dalam konteks layanan Pendidikan dasar yang merata.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas segala limpahan karunia yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua ayah dan bunda yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk penulis. Tidak lupa juga teruntuk para dosen yang selama ini sudah memberikan berbagai Pelajaran yang berharga dalam mengenyam dunia Pendidikan terkhusus dosen pembimbing penulis Bapak Nur Ichsan Amin yang telah membimbing penulis dengan penuh tanggung jawab. Teruntuk almamater tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan seluruh orang yang terlibat didalamnya penulis mengucapkan banyak terimakasih atas motivasi, semangat dan dukungannya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan Dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Di Era Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 141–153. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/1870>
- Allen, R. (2015). Education Policy. *National Institute Economic Review*, 231(1), R36–R43. <https://doi.org/10.1177/002795011523100105>
- Angulo, A. J., & Schneider, J. (2024). Politics, Public Policy, and Sex Education. *History of Education Quarterly*, 64(2), 117–120. <https://doi.org/10.1017/heq.2024.3>
- Ekowati, M. (2020). Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 2(1), 21. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2288/1107>
- Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, V(086), 94–109. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/27635>
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93–110. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/50>
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Wahyuni, N. (2021). Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tingkat Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 65–84. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/424/1/IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/424/1/IMPLEMENTASI_PROGRAM_DANA_BANTUAN_OPERASIONAL_SEKOLAH.pdf)
- Mammadova, T. (2023). Azerbaijani Higher Education to implement mass English Medium Instruction (EMI) Policies. *English Today*. <https://doi.org/10.1017/S0266078423000421>
- Meier, K. J., & Dhillon, A. (2022). Gender and the State Politics of Policy Implementation in Education: The Interaction of Bureaucratic and Legislative Representation in India. *State Politics and Policy Quarterly*, 22(3), 344–370. <https://doi.org/10.1017/spq.2021.30>
- Mulyana, M., & Al Habib, M. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1), 1–14. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4087>
- Oktavian, D. P., & Adi, E. A. W. (2021). Implementasi Pendanaan Sektor Pendidikan Dalam Masa Otonomi Khusus Papua. *Khatulistiwa Law Review*, 2(2), 359–378. <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/387>
- Renaldi, M. Z. A., & Agustina, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 11(2), 121–129. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4760/2075>

- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sinen, K. (2025). Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(4), 961–970. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/4454/3438>
- Sinurat, M., Putri, R. S. S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 89–105. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3417>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Tatogo, M., Allo Layuk, T., & Bharanti, B. E. (2018). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(2), 63–83. <https://core.ac.uk/download/pdf/228786009.pdf>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Warouw, S., Nangoy, G., & Runtu, T. (2016). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 627–637. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/11474>
- Willig, J. H., Croker, J., McCormick, L., Nabavi, M., Walker, J., Wingo, N. P., Roche, C. C., Jones, C., Hartmann, K. E., & Redden, D. (2021). Gamification and education: A pragmatic approach with two examples of implementation. *Journal of Clinical and Translational Science*, 5(1). <https://doi.org/10.1017/cts.2021.806>

